

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 7/HM.00.02/K.JI-21/07/2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

- Menimbang** : a. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ponorogo; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2026 di Bawaslu Kabupaten Ponorogo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Daftar Informasi Publik Tahun 2026 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo
- PERTAMA** : Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2026 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Ponorogo dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan catatan yang berisi keterangan secara sistematis mengenai seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Bawaslu

Kabupaten Ponorogo tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Ponorogo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo,



M. BAHRUN MUSTOFA, S.Pd.I.

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;
3. Yang bersangkutan.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 20256DI BAWASLU KABUPATEN PONOROGO

INFORMASI BERKALA							
No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Cetak	Online	
I. Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu							
1	Profil Singkat Pimpinan dan Kepala Sekretariat	Humas	Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	2019	√	√	
2	Visi dan Misi	Humas	Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	2019		v	
3	Struktur Organisasi	Humas	Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	2019		√	
4	Sejarah	Humas	Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	2019	√	√	
5	Alamat Lengkap	Humas	Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	2019		√	
6	Daftar Permohonan Informasi Teregistrasi	Humas	Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	2024		√	
II. Informasi Kegiatan dan Kinerja Bawaslu							
1	Laporan Kinerja Bawaslu Kabupaten PONOROGO Tahun 2019	Divisi OSDM dan Datin	Divisi OSDM dan Datin	2019		√	
2	Rencana dan Program 2024	Divisi OSDM dan Datin	Divisi OSDM dan Datin	2024		√	
3	PONOROGO - Laporan Pelaksanaan Program-Kegiatan Bulan Januari s.d. Juni TA 2023	Divisi OSDM dan Datin	Divisi OSDM dan Datin	2023	√	√	
III. Informasi Mengenai Keuangan							
1	Laporan BMN 2026	Administrasi	Divisi OSDM dan Datin	2023		√	
2	DIPA 2022	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2022	√	v	
3	DIPA 2023	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2023	√	v	
4	DIPA 2024	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2024	√	v	
5	RKA 2022	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2022	√	v	
6	RKA 2023	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2023	√	v	
7	RKA 2024	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2024	√	v	
8	RKKS Kabupaten PONOROGO (RKA - KL) 2023	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2023	√	v	
9	RKKS Kabupaten PONOROGO (RKA - KL) 2024	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2024	√	v	
10	KARWAS APBN Kabupaten PONOROGO	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2023	√	v	
11	CALK LRA NERACA 2024	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2024	√	v	
12	Pengadaan Sewa Peralatan untuk Panwascam se-Kab PONOROGO 2023	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2023	√	v	
13	Belanja Bahan berupa Konsumsi dan Snack pada Rapat Monitoring, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan program Bawaslu Kabupaten PONOROGO	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2023	√	v	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	2023						
14	Belanja Bahan berupa Penanda Identitas Desa Kelurahan se-Kab PONOROGO 2023	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2023	√	v	
15	Belanja Bahan berupa Penanda Identitas Kecamatan se-Kab PONOROGO 2023	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2023	√	v	
16	Belanja Bahan berupa Jamuan Tamu Kecamatan se-Kabupaten PONOROGO 2023	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2023	√	v	
17	Sewa Mobil Gakkumdu Bawaslu Kabupaten PONOROGO TA 2024	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2024	√	v	
18	Pengadaan Sewa Peralatan untuk Panwascam se-Kabupaten PONOROGO	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2024	√	v	
19	Pengadaan Sewa Meubelair untuk Panwascam se-Kabupaten PONOROGO	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2024	√	v	
20	Pengadaan Sewa Meubelair Gakkumdu Bawaslu Kabupaten PONOROGO	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2024	√	v	
21	Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara Bawaslu Kabupaten PONOROGO	Keuangan	Divisi OSDM dan Datin	2024	√	v	
IV. Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian							
1	Informasi Kepegawaian 2019	Administrasi	Divisi OSDM dan Datin	2019		√	
2	Informasi Kepegawaian 2020	Administrasi	Divisi OSDM dan Datin	2020		√	
3	Informasi Kepegawaian 2021	Administrasi	Divisi OSDM dan Datin	2021		√	
4	Informasi Kepegawaian 2022	Administrasi	Divisi OSDM dan Datin	2022		√	
5	Informasi Kepegawaian 2023	Administrasi	Divisi OSDM dan Datin	2023		√	
V. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik							
1	Daftar Informasi Publik 2018	Humas	Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	2019		√	
2	Daftar Informasi Publik 2019	Humas	Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	2020		√	
3	Daftar Informasi Publik 2020	Humas	Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	2021		√	
4	Daftar Informasi Publik 2021	Humas	Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	2022		√	
5	Daftar Informasi Publik 2021	Humas	Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	2022		√	
6	Daftar Informasi Publik 2022	Humas	Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	2023		√	
7	Daftar Informasi Publik 2024	Humas	Divisi OSDM dan Datin	2024		√	
8	Daftar Informasi Publik 2025	Datin	Divisi OSDM dan Datin	2024		√	
11	Informasi Yang Di Kecualikan	Humas	Divisi OSDM dan Datin	2024		√	
12	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten PONOROGO	Humas	Divisi OSDM dan Datin	2024		√	
INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT							
No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Cetak	Online	
VI. Informasi Mengenai Kerjasama							
1	Nota Kesepahaman (MoU) dengan SMAN 1 PONOROGO	PHL	Divisi HPP	2022	√	√	
2	Nota Kesepahaman (MoU) dengan SMKN 2 PONOROGO	PHL	Divisi HPP	2022	√	√	
3	Nota Kesepahaman (MoU) dengan RADIO AL MANAR	PHL	Divisi HPP	2022	√	√	
4	Nota Kesepahaman (MoU) dengan FH UNMUH	PHL	Divisi HPP	2022	√	√	
5	Nota Kesepahaman (MoU) dengan FH IAIN PONOROGO	PHL	Divisi HPP	2022	√	√	
6	Nota Kesepahaman (MoU) dengan NPCI PONOROGO	PHL	Divisi HPP	2022	√	√	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Ponpes Nurul Hikam Ponorogo	PHL	Divisi HPP	2024	√	√	
8	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Diskominfo Ponorogo	PHL	Divisi HPP	2026	√	√	
INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT							
No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Cetak	Online	
VI. Surat Keputusan							
1	SK PERUBAHAN PPID BAWASLU Kabupaten PONOROGO TA 2022	Kelembagaan	Divisi OSDM dan Datin	2022	√	√	
2	SK PENUNJUKAN STAF PENGELOLA ARSIP	Kelembagaan	Divisi OSDM dan Datin	2023	√	√	
3	SK PERUBAHAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PONOROGO PPID TA_2023	Kelembagaan	Divisi OSDM dan Datin	2023	√	√	
4	SK TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Kelembagaan	Divisi HPP	2026	√	√	
5	SK PERPANJANGAN TENAGA ALIH DAYA Q2 2026	Kelembagaan	Divisi HPP	2023	√	√	
6	SK PERUBAHAN KEDUA GAKKUMDU KABUPATEN PONOROGO NOVEMBER 2023	Kelembagaan	Divisi HPP	2023	√	√	
7	SK KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL	Kelembagaan	Divisi HPP	2024	√	√	
8	SK PENETAPAN SENTRA GAKKUMDU BAWASLU	Kelembagaan	Divisi HPP	2024	√	√	
9	SK PERUBAHAN PENETAPAN SENTRA GAKKUMDU BAWASLU	Kelembagaan	Divisi HPP	2024	√	√	
10	SK PERUBAHAN II PENETAPAN SENTRA GAKKUMDU BAWASLU	Kelembagaan	Divisi HPP	2024	√	√	
11	SK PERUBAHAN III PENETAPAN SENTRA GAKKUMDU BAWASLU	Kelembagaan	Divisi HPP	2024	√	√	
12	SK TAD BAWASLU	Kelembagaan	Divisi OSDM dan Datin	2026	√	√	
13	SK PPID BAWASLU KABUPATEN PONOROGO TA 2024	Kelembagaan	Divisi OSDM dan Datin	2024	√	√	
14	SK DAN LAMPIRAN DIP BAWASLU Kabupaten PONOROGO TAHUN 2026	Kelembagaan	Divisi OSDM dan Datin	2026	√	√	
15	SK PPID BAWASLU KABUPATEN PONOROGO TA 2025	Kelembagaan	Divisi OSDM dan Datin	2025	√	√	
INFORMASI SERTA MERTA							
No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Cetak	Online	
VII. Informasi Hasil Penelitian							
1	Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2019	PHL	Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	2019	√	√	
VII. Informasi Mengenai Pengawasan Pemilu							
1	Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019	Divisi PPM	Divisi PPM	2019	√	√	
2	Laporan Akhir Pemilu 2019 KABUPATEN PONOROGO	Divisi PPM	Divisi PPM	2019	√	√	
3	Laporan Akhir Humas PONOROGO 2021	Divisi PPM	Divisi PPM	2021	√	√	
4	Laporan PPID Bawaslu Kabupaten PONOROGO Tahun 2021	Divisi OSDM dan Datin	Divisi OSDM dan Datin	2021	√	√	
5	Laporan Keterbukaan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo 2021	Divisi OSDM dan Datin	Divisi OSDM dan Datin	2021	√	√	
6	Laporan Akhir Kabupaten PONOROGO Divisi PPM 2022	Divisi PPM	Divisi PPM	2022	√	√	
7	Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten PONOROGO	Divisi OSDM dan Datin	Divisi OSDM dan Datin	2023	√	√	
8	Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten PONOROGO Tahun 2024	Divisi OSDM dan Datin	Divisi OSDM dan Datin	2024	√	√	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9	Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten PONOROGO Tahun 2024	Divisi OSDM dan Datin	Divisi OSDM dan Datin	2025	√	√	
10	Laporan Akhir Kabupaten PONOROGO DPRD 2024	Divisi PPM	Divisi PPM	2023	√	√	
11	Laporan Akhir Kabupaten PONOROGO Divisi PPM 2023	Divisi PPM	Divisi PPM	2023	√	√	
12	Laporan Pembinaan Tatanaskah, Kearsipan, Serta Kehumasan Tahun 2024	Divisi OSDM dan Datin	Divisi OSDM dan Datin	2024	√	√	
13	Laporan Kampanye Dan Masa Tenang Bawaslu Kabupaten PONOROGO 2024	Divisi PPM	Divisi PPM	2024	√	√	
14	Laporan Akhir Gakkumdu Bawaslu Kabupaten PONOROGO Pemilu 2024	Divisi PP	Divisi PP	2024	√	√	
15	Laporan Akhir Divisi PP Bawaslu Kabupaten PONOROGO 2024	Divisi PP	Divisi PP	2024	√	√	
16	Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Kabupaten PONOROGO 2024	Divisi PPM	Divisi PPM	2024	√	√	
17	Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan 2024	Divisi PP	Divisi PP	2024	√	√	
18	Laporan Akhir Divisi PPM Pada Pemilihan 2024	Divisi PPM	PPM	2024	√	√	
19	Laporan Akhir Kehumasan Bawaslu Kabupaten PONOROGO Tahun 2024	Humas	Humas	2024	√	√	
20	Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Logistik Pemilu dan Pemilihan 2024	Divisi OSDM dan Datin	Divisi OSDM dan Datin	2024	√	√	
21	Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Pilkada Tahun 2024	Divisi OSDM dan Datin	Divisi OSDM dan Datin	2024	√	√	
22	Laporan Komprehensif Divisi SDMO dan Diklat 2024	Divisi OSDM dan Datin	Divisi OSDM dan Datin	2024	√	√	
23	Laporan Pelatihan Saksi Pada Pemilu dan Pemilihan 2024	Divisi OSDM dan Datin	Divisi OSDM dan Datin	2024	√	√	
24	Pencegahan Dapil 022	Divisi PPM	Divisi PPM	2022	√	√	